



Persepsi Masyarakat terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan (Perspektif Sosiologi Gender dalam Pilkada NTB 2024)

Huldiya Syamsiar,^{1*} Abdul Latif,¹ Abdurrohman¹

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, FISE, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: huldiya_syamsiar@hamzanwadi.ac.id, abdullatif@hamzanwadi.ac.id,
armindo.dmk@gmail.com

*Korespondensi

Article History: Received: 21-05-2025, Revised: 14-06-2025, Accepted: 15-06-2025, Published: 30-06-2025

Abstrak

Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pemilihan Kepala Daerah bukan hanya persoalan elektabilitas calon, tapi juga bagian dari perjuangan panjang untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada NTB 2024, dengan pendekatan Sosiologi Gender yaitu memfokuskan pada kajian tentang peran, hubungan, dan ketidaksetaraan gender yang menekankan pada dinamika hubungan antara gender dan politik. Teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckman, sangat relevan untuk memahami dinamika gender dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dari Milles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beragam persepsi masyarakat terkait dengan calon kepala daerah perempuan pertama, terdapat persepsi yang dipengaruhi oleh norma budaya dan Agama masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi yang kuat Dimana budaya *Patriarkhi* masih dominan dalam cara pandang terhadap perempuan dalam ranah politik masih sangat hati-hati. Kedua Persepsi tentang kemampuan kepemimpinan, beberapa masyarakat beranggapan bahwa perempuan dianggap kurang mampu menghadapi tantangan besar dalam pemerintahan, yang lebih mengedepankan kekuatan fisik dan ketegasan. Ketiga kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender menunjukkan keraguan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam memimpin. Keempat ada persepsi bahwa dukungan partai politik dan popularitas calon, partai politik yang mendukung calon perempuan dengan visi yang jelas dan program-program yang relevan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik calon tersebut di mata pemilih.

Kata Kunci:

kepala daerah perempuan; Pilkada NTB; sosiologi gender

Abstract

Public awareness of gender equality in the Pilkada is not only a matter of candidate electability, but also part of a long struggle to change social norms that limit women. This study aims to explore public perceptions of female regional head candidates in the 2024 NTB Regional Elections, with a Gender Sociology approach namely focusing on the study of gender roles, relationships and inequality that emphasizes the dynamics of the relationship between gender and politics. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The data collection techniques used are observation and

interviews. The data analysis used in this study is data analysis from Milles and Huberman which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that there are various public perceptions related to the first female regional head candidate, there are perceptions that are influenced by the norms culture and religi of the NTB community which is predominantly Muslim and has strong traditions Where the Patriarchal culture is still dominant in the way women are viewed in the political realm is still very careful. Second, perceptions about leadership skills, some people think that women are considered less able to face major challenges in government, which emphasizes physical strength and assertiveness. Third, public awareness of gender equality shows doubt that women have the same capacity as men to lead. Fourth, there is a perception that political party support and candidate popularity, political parties that support female candidates with clear visions and relevant programs can increase the credibility and attractiveness of these candidates in the eyes of voters.

Keywords:

female regional head; gender sociology; Pilkada NTB



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu peristiwa krusial dalam sistem politik di Indonesia. Proses pemilihan yang dilakukan secara serentak, dan ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan menyuarakan keinginan mereka dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, selain itu keikutsertaan perempuan dalam pemilihan menunjukkan perubahan dalam perspektif politik (Kambo, 2017). Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dinilai mampu membawa perubahan serta kemajuan bagi wilayah mereka. Dalam konteks ini, keberadaan calon kepala daerah perempuan menjadi isu yang semakin relevan.

Namun, dalam konteks Pilkada 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), munculnya calon kepala daerah perempuan menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam dunia politik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia masih rendah, dengan hanya 20% dari kursi legislatif yang diduduki perempuan pada pemilu terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023). Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks NTB, di mana perempuan mencapai 49,5% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2022), namun partisipasi mereka dalam politik, khususnya sebagai calon kepala daerah, masih terbatas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, proporsi perempuan di NTB mencapai 49,5% dari total populasi, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun jumlah perempuan cukup besar, partisipasi mereka dalam politik, khususnya sebagai calon kepala daerah, masih rendah. Menurut kebijakan afirmasi yang menetapkan keterwakilan minimal 30% perempuan di lembaga legislatif, partisipasi perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender (Hanasi, 2025).

Berbagai penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, namun studi khusus mengenai calon kepala daerah perempuan di NTB masih terbatas. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh (Marwah et al., 2022), mengenai representasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah calon perempuan, masih terdapat tantangan dalam hal dukungan masyarakat. Hal ini menjadi latar belakang yang penting untuk membandingkan dengan situasi di NTB, di mana konteks budaya dan sosialnya berbeda. Selain itu penelitian oleh (Iqbal, 2023) mengungkapkan bahwa transformasi peran perempuan dalam masyarakat yang terbelenggu oleh budaya patriarki mengalami kemajuan, namun masih terdapat banyak tantangan. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis konteks NTB, di mana budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi gender. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Aceh Besar (Hilmiati et al., 2022) menemukan bahwa meskipun ada dukungan terhadap kepemimpinan perempuan, masih terdapat keraguan yang signifikan terhadap kemampuan mereka dalam memimpin.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi gender, yang akan menggali lebih dalam bagaimana struktur sosial dan budaya di NTB mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam politik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian gender dan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik budaya yang unik.

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya sekedar tuntutan keadilan sosial, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh (Women, 2020) partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih memperhatikan isu-isu gender dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa daerah yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih memperhatikan isu-isu sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Namun, tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik tetap besar. Di NTB, stigma dan stereotip negatif terhadap perempuan yang berambisi untuk menjadi pemimpin masih sangat kuat. Banyak perempuan yang merasa tertekan untuk memenuhi harapan tradisional sebagai istri dan ibu, sehingga mengabaikan ambisi politik mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, termasuk melalui pendidikan dan kampanye kesadaran (Natasya et al., 2024).

Data dari KPU menunjukkan bahwa pada Pilkada 2020, hanya 8% dari total calon kepala daerah adalah perempuan. Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka ini adalah kurangnya dukungan dari partai politik, yang sering kali lebih memilih calon laki-laki yang dianggap lebih "kompeten" dalam konteks politik. (Fitriani, 2023) bahwa banyak partai politik masih melihat perempuan sebagai pemilih bukan sebagai calon pemimpin. Pada praktiknya, perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti diskriminasi dan stereotip gender. Perempuan sering kali dianggap kurang mampu dalam mengambil keputusan dan memimpin, yang

dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mereka (Sari, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye yang menekankan kemampuan dan prestasi perempuan dalam bidang politik.

Partisipasi Perempuan dalam ajang kontelasi politik pilkada serentak Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Calon Gubernur Perempuan Pilkada serentak Indonesia Tahun 2024

Nama	Pimpinan Daerah
Sitti Rohmi Djalilah	Nusa Tenggara Barat
Khofifah Indar Parawansa	Jawa Timur
Tri Rismahirini	Jawa Timur
Luluk Nurhamidah	Jawa Timur
Airin Rachmy Diani	Banten
Raudatul Jannah	Kalimantan Selatan
Tina Nur Alam	Sulawesi Tenggara

Sumber: Diperoleh dari KPU/Diolah oleh Litbang Kompas 2024

Secara khusus, sosiologi gender melihat bagaimana perbedaan gender dalam identitas, peran, dan perilaku dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan kebijakan publik. Dalam kerangka sosiologi gender, berbagai pendekatan teoritis telah digunakan untuk memahami bagaimana peran dan identitas gender terbentuk, serta bagaimana masyarakat memaknai kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin. Salah satunya adalah teori *doing gender* yang dikembangkan oleh (West & Zimmerman, 1987). Teori ini menekankan bahwa gender bukanlah sesuatu yang melekat, tetapi sesuatu yang “dilakukan” melalui interaksi sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, kepemimpinan dianggap sebagai praktik gender yang secara historis dikaitkan dengan maskulinitas, sehingga perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dianggap menyimpang dari norma tersebut.

Gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, budaya, dan kebijakan yang ada di masyarakat, bukan sifat bawaan dari tubuh. Dengan kata lain, gender mempengaruhi bagaimana seseorang diharapkan bertindak, berpikir, dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, ekonomi, dan politik (Brickell, 2006). Dalam konteks ini, teori gender sangat penting untuk menganalisis bagaimana perempuan diposisikan di ruang publik khususnya dunia politik oleh masyarakat. Selanjutnya, (Connell, 2003) memperkenalkan konsep *hegemonic masculinity*, yakni bentuk maskulinitas yang diposisikan sebagai norma dominan yang mengatur struktur kekuasaan dalam masyarakat. Konsep ini relevan untuk melihat bagaimana struktur politik dan persepsi publik mengedepankan laki-laki sebagai figur ideal dalam kepemimpinan, dan secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan yang masuk dalam kontestasi politik.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks, yang diciptakan, dilembagakan, dan diwariskan melalui sosialisasi (Peter L. Berger, 1990). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat NTB memandang calon kepala daerah perempuan, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi persepsi tersebut. Pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Lebih lanjut dalam bukunya

yang berjudul *The Politics of Presence*, (Phillips, 1995) menekankan bahwa perempuan harus hadir dalam politik bukan hanya karena mereka merupakan bagian dari kesetaraan gender tetapi juga karena mereka berusaha untuk mewakili kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Phillips, perempuan membawa perspektif yang berbeda dan unik dalam proses pengambilan keputusan, yang seringkali lebih inklusif dan responsif terhadap masalah yang muncul.

Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2024, kesetaraan gender tidak hanya mencakup pemberian kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi partisipasi tersebut. Seringkali masyarakat masih terjebak dalam pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Selain itu pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat membantu mengubah persepsi tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender harus melibatkan pendidikan dan kampanye yang menjangkau masyarakat luas (Rahmayanty et al., 2023).

Menurut Fakih untuk memahami konsep gender harus dibedakan dari kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Kalau gender pada umumnya digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sosial dan budaya, kemudian seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (Mansour Fakih, 2013). Gender pada dasarnya menuntut peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, perempuan semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan di bidang ini berupaya untuk membuat diri mereka dikenal di arena politik (Karauwan, 2021). Peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat krusial untuk pembangunan yang bertujuan memastikan semua warga negara dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan (Sangari et al., 2017). Selain itu menurut (Kaltsum et al., 2022) perlunya penguatan identitas politik perempuan melalui identitas lokal atau adat daerah masing-masing karena memiliki peranan yang sangat penting menentukan posisi perempuan.

Dalam konteks NTB, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik, seperti pelatihan bagi calon perempuan dan kampanye kesadaran. Namun, efektivitas inisiatif ini masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat berperan penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik, serta mengubah persepsi negatif yang ada (Kiki & Ali, 2024). Namun, meskipun progres ini menunjukkan adanya kemajuan, tetap ada tantangan yang perlu dihadapi dalam hal persepsi dan pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam politik.

Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada NTB 2024 dengan pendekatan sosiologi gender yaitu memfokuskan pada kajian tentang peran, hubungan, dan ketidaksetaraan gender yang menekankan pada dinamika hubungan antara gender dan politik dimana peneliti mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana norma sosial dan budaya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

perempuan dalam politik, serta bagaimana struktur kekuasaan yang ada mempengaruhi peluang perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Penelitian ini juga penting dalam konteks kesetaraan gender, yang merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik. Di NTB, di mana calon kepala daerah perempuan mulai bermunculan, memahami persepsi masyarakat akan membantu menciptakan ruang yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah tersebut. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di sektor politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, serta memberi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan bahkan negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat terkait calon kepala daerah perempuan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dari pengalaman subjektif informan, yang dalam hal ini adalah masyarakat NTB. Menurut (Creswell, 2019), penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika sosial di masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah dan peran perempuan dalam politik. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan, termasuk tokoh masyarakat, para calon pemilih baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai persepsi masyarakat.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik yang diusulkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2008). Proses awal yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber atau informan, proses yang kedua reduksi data, yaitu menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Ini dilakukan dengan membaca ulang data yang diperoleh dari observasi, dan wawancara. Selanjutnya tahap ketiga penyajian data, seluruh data yang didapatkan di lapangan berupa hasil observasi dan wawancara akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang akurat dan kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Proses ini dilakukan secara interaktif di mana peneliti terus-menerus kembali ke data untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap relevan dan akurat. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah

perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari beberapa wawancara terungkap bahwa faktor pendidikan dan latar belakang keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat. Informan yang berasal dari latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih mendukung terhadap calon kepala daerah perempuan dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan dan kesadaran gender dalam politik. Misalnya, di kalangan pemilih muda yang terdidik, terdapat dukungan yang lebih besar terhadap calon perempuan, yang menunjukkan perubahan positif dalam pandangan mereka tentang peran perempuan dalam kepemimpinan.

Namun, terdapat juga pandangan skeptis terhadap calon kepala daerah perempuan, yang sering kali berkaitan dengan norma-norma gender yang masih kuat di masyarakat. Beberapa informan menyatakan keraguan terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin, dengan alasan bahwa perempuan lebih cocok berada di ranah domestik. Selain itu beberapa informan juga mengatakan bahwa tantangan masih ada, terutama dari segi media yang sering kali menampilkan calon perempuan dengan cara yang merendahkan atau tidak serius. menunjukkan bahwa media sering kali menyoroti aspek fisik dan penampilan calon perempuan, yang dapat mengalihkan perhatian dari kapasitas dan visi mereka (Rahmawati & Ummah, 2023). Oleh karena itu, penting bagi calon kepala daerah perempuan untuk mengedukasi masyarakat tentang visi dan misi mereka secara lebih efektif.

Norma Budaya dan Agama Masyarakat

Masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi yang kuat mungkin memandang perempuan dalam politik dengan lebih hati-hati. Di beberapa komunitas, ada pandangan yang lebih konservatif mengenai peran perempuan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, budaya *patriarki* yang sudah lama terbentuk sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan penuh. Banyak yang masih mempertanyakan apakah seorang perempuan bisa efektif dalam memimpin, terutama dalam mengelola isu-isu besar seperti pembangunan, ekonomi, dan keamanan yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang maskulin.

Norma budaya yang mengedepankan peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pendidik anak sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa Masyarakat NTB yang masih kental dengan nilai-nilai *patriarki* cenderung meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin, sehingga persepsi negatif ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar perempuan calon kepala daerah dapat diterima secara luas. Agama juga memiliki pengaruh terhadap norma dan nilai dalam masyarakat NTB. Sebagian besar penduduk NTB beragama Islam, yang mana ajaran agama sering kali berperan dalam pembentukan pandangan masyarakat terhadap perempuan. Dalam konteks ini, beberapa masyarakat berpendapat bahwa perempuan seharusnya tidak mengambil peran publik yang dominan khusus hanya di fokus pada ranah domestik.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam budaya lokal yang berkembang di NTB, khususnya dalam komunitas Sasak, peran kepemimpinan

masih sangat identik dengan laki-laki. Tradisi yang diwariskan dari generasi-kegenerasi menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, dan pengambil keputusan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Menurut Pak Sahrim seorang tokoh masyarakat di Lombok Tengah mengatakan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, kalau perempuan lebih cocok urusan rumah tangga (Wawancara tanggal 1 Oktober 2024). Pernyataan ini adalah refleksi bagaimana norma budaya bekerja sebagai struktur sosial yang menginternalisasi peran gender secara berbeda. Dari perspektif sosiologi gender, ini dapat dijelaskan menggunakan teori *Hegemonic Masculinity* dari (Connell, 2003), yang merupakan sistem nilai yang menempatkan maskulinitas sebagai tolak ukur ideal kepemimpinan, dan memandang feminin sebagai subordinat dalam hal kekuasaan dan otoritas.

Sebagian besar masyarakat NTB adalah muslim, dan wawancara menunjukkan bahwa agama berperan penting dalam membentuk pandangan terhadap peran gender. Beberapa informan menyebutkan bahwa dalam ajaran agama, perempuan memiliki tanggung jawab utama di ranah domestik, sementara ranah publik, termasuk kepemimpinan politik, lebih diperuntukkan bagi laki-laki. Hal ini dipertegas oleh H. Mujib sebagai seorang tokoh agama di Lombok Timur bertutur kalau menjadi seorang pemimpin lebih baik seorang laki-laki itu sudah diatur dalam agama khususnya Islam (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024).

Tetapi, ada juga pendapat yang berlawanan menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, selama dia memenuhi syarat, kompeten, dan menjalankan amanah yang diberikannya. Hal ini dipertegas oleh seorang aktivis perempuan dari Mataram menjelaskan bahwa tidak ada masalah pemimpin perempuan selagi masih punya ilmu, jujur, bertanggung jawab dan bisa kerja (Wawancara tanggal 29 september 2024)

Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang perdebatan mengenai interpretasi keagamaan. Perspektif sosiologi gender, khususnya pendekatan kontruksionis sosial, memahami bahwa agama bukan sekedar teks normatif, tetapi juga praktik sosial yang dipengaruhi oleh interpretasi budaya. Dalam hal ini, konsep gender sebagai hasil konstruksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh (West & Zimmerman, 1987), menjadi kunci untuk memahami bagaimana agama secara selektif digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki.

Norma budaya dan interpretasi agama dalam masyarakat NTB tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam membentuk pemaknaan sosial terhadap kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan argumen Walbi (1990) dalam (Murray, 1990) tentang konsep patriarki yang tidak hanya berada di tingkat rumah tangga, tetapi juga menyebar ke institusi agama, budaya, dan negara. Dalam hal ini, persepsi terhadap kandidat perempuan dibentuk oleh relasi kuasa yang memadukan simbol budaya dan keagamaan. Perempuan yang mencalonkan diri, dianggap menyalahi kodrat atau "keluar dari garis" yang telah ditentukan secara sosial oleh masyarakat.

Namun, terdapat juga interpretasi agama yang lebih progresif yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Beberapa tokoh agama di Lombok telah mulai mendukung calon kepala daerah perempuan, dengan alasan bahwa kepemimpinan perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dan lebih inklusif. Beberapa tokoh masyarakat dan agama telah menyatakan dukungan mereka terhadap calon perempuan dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman kerja yang relevan. Ini menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada. Menurut (Hulaipah et al., 2024) kuatnya budaya

patriarki menyebabkan akses, partisipasi, dan kesempatan tidak sepenuhnya dinikmati oleh salah satu jenis kelamin khususnya perempuan misalnya dalam bidang pendidikan sehingga mengakibatkan terjadi ketidaksetaraan gender yang termuat yaitu subordination atau penomoran yang merupakan perlakuan menomorduakan seseorang yang mengakibatkan menempati posisi rendah dan tidak diprioritaskan.

Menganalisis mengenai persepsi terhadap perempuan dalam politik pilkada NTB, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dapat memberikan perspektif yang sangat relevan. Proses eksternalisasi merujuk pada cara masyarakat menciptakan dan mengungkapkan norma serta nilai yang membentuk pandangan mereka terhadap dunia sosial, termasuk mengenai peran gender. objektivikasi, di mana norma yang telah diciptakan melalui eksternalisasi mulai dipandang sebagai sesuatu yang nyata dan alami, bahkan tak dapat dipertanyakan lagi. Dalam masyarakat NTB, pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang lebih tegas dan perempuan seharusnya mengurus rumah tangga atau mendidik anak mulai dianggap sebagai realitas yang objektif dan benar adanya. Pandangan ini, meskipun bersifat konstruksi sosial, diterima dan dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang tak terbantahkan. Kemudian pada tahapan Internalisasi penerimaan dan penguatan pandangan Gender dalam masyarakat baik itu secara individu dan kolektif mulai menginternalisasi norma sosial yang telah dibentuk dan dianggap sebagai bagian dari kenyataan hidup mereka.

Persepsi Tentang Kemampuan Kepemimpinan

Menurut masyarakat beranggapan bahwa perempuan kurang mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi tertentu, yang lebih mengutamakan kekuatan fisik dan ke tegasan. Meskipun demikian, ada pula pandangan yang berusaha menilai calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan rekam jejak mereka, bukan hanya jenis kelamin. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah stereotip gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Stereotip tersebut seringkali menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lebih emosional dan kurang rasional dibandingkan laki-laki.

Pengalaman kepemimpinan perempuan di daerah lain juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat di NTB. Misalnya, keberhasilan beberapa kepala daerah perempuan di provinsi lain, seperti Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa dan Sitti Rohmi Djalilah yang sudah menjabat sebelumnya menjadi wakil gubernur NTB dapat menjadi contoh positif. Namun, tidak semua masyarakat terpengaruh oleh contoh-contoh tersebut. Hanya Masyarakat yang berlatar berpendidikan terutama kaum hawa yang merasa terinspirasi oleh keberhasilan pemimpin perempuan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konteks lokal sangat berpengaruh terhadap cara pandangan masyarakat.

Sebagian besar informan laki-laki dan beberapa informan perempuan dari kelompok usia tua berpendapat bahwa, khususnya dalam posisi strategis seperti kepala daerah, lebih cocok laki-laki sebagai seorang pemimpin. Penilaian ini bukan didasarkan pada kompetensi teknis, melainkan pada asumsi karakteristik gender. Perihal ini disampaikan oleh Pak Baharudin seorang Tokoh Agama Di Anjani Lombok Timur mengatakan bahwa menjadi Bupati itu harus laki-laki, tegas serta siap menerima segala resiko (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024)

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *hegemonic masculinity* oleh R. W. Connell (1995) yang menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan sering dikonstruksikan secara maskulin — rasional, kuat, tegas — yang membuat perempuan dianggap tidak kompeten secara struktural dalam peran tersebut. Sebaliknya, ada pula kelompok masyarakat dari kalangan muda dan terdidik, yang percaya bahwa pengalaman kepemimpinan, integritas, dan keahlian lebih penting daripada jenis kelamin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang perempuan guru honorer di Lombok Barat menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin karena lebih hati-hati dan detail yang penting ada tujuan yang jelas (Wawancara tanggal 29 September 2024). Pernyataan ini menggambarkan apa yang (West & Zimmerman, 1987) sebut sebagai *doing gender*, yakni bagaimana orang "memainkan" peran gender mereka dalam interaksi sosial. Di sini, perempuan yang tampil sebagai pemimpin mencoba menegosiasikan dan menantang norma yang telah dikonstruksi sebagai milik laki-laki. Menariknya, beberapa informan menyatakan bahwa meskipun mereka mengakui bahwa ada perempuan yang kompeten secara teknis dan profesional, mereka tetap ragu memberikan dukungan politik karena dianggap "tidak sesuai kodrat". Hal tersebut diperjelas oleh seorang ibu rumah tangga di Mataram menuturkan bahwa perempuan menjadi pemimpin itu besar tanggung jawabnya dan bebannya bertambah karena mengurus anak (Wawancara tanggal 29 September 2024).

Hal ini menunjukkan adanya internalisasi norma patriarkal yang dijelaskan oleh Sylvia Walby (1990), di mana perempuan tidak hanya dibatasi oleh faktor luar, dan persepsi sosial yang menganggap bahwa peran domestik adalah prioritas utama mereka. Dalam sistem patriarki, bahkan perempuan pun turut mereproduksi struktur yang membatasi mereka. Beberapa informan menyebutkan bahwa perempuan memiliki kelebihan dalam hal komunikasi, empati, dan kedekatan emosional dengan masyarakat, karakteristik yang justru dianggap penting dalam konteks kepemimpinan lokal yang dekat dengan rakyat. Hal senada yang dituturkan oleh seorang petani Pak Ojan dari Dasan Lekong Lombok Timur bahwasanya perempuan yang menjadi kepala daerah lebih perhatian dan dekat dengan warga (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024).

Menurut perspektif Pierre Bourdieu dalam (Ida Bagus Wirawan, 2014), hal ini dapat dianalisis sebagai bentuk modal simbolik, yaitu sebuah alternatif gaya kepemimpinan yang lebih empatik dan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini mulai membentuk alternatif baru terhadap dominasi gaya kepemimpinan maskulin. Pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai gender juga tidak bisa diabaikan. Program-program edukasi yang menekankan pada kesetaraan gender dan kemampuan kepemimpinan perempuan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Misalnya, telah dilakukan kampanye dengan hasil yang berdampak positif yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah seperti Perempuan Berdaya NTB, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi kepemimpinan perempuan. Dalam sebuah seminar yang diadakan pada bulan Maret 2023, 70% peserta menyatakan bahwa mereka lebih terbuka terhadap calon kepala daerah perempuan setelah mengikuti program tersebut (Oxfam di Indonesia, 2023). Akhirnya, penting untuk melakukan pendekatan secara komprehensif dan inklusif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta

pemuda yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi calon perempuan. Oleh karena itu perubahan persepsi terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan dapat terjadi secara bergeseran bertahap.

Dalam hal ini, persepsi tentang kepemimpinan perempuan mulai bergeser, terutama jika calon perempuan tersebut mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan mempunyai visi yang jelas untuk masa depan NTB. Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di politik seperti konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

Kesadaran tentang Kesetaraan Gender Masyarakat

Fakta dilapangan bahwa dari beberapa informan menunjukkan ketidaktahuan tentang kesadaran kesetaraan gender, hal ini merupakan faktor penting dalam menentukan dukungan terhadap calon kepala daerah perempuan. menyatakan bahwa mereka tidak percaya perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam memimpin. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran gender di masyarakat. Dalam perspektif sosiologi gender, kesadaran gender dapat didefinisikan sebagai pemahaman individu dan kolektif mengenai peran, tanggung jawab, dan hak perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Norma-norma sosial yang ada di masyarakat sering kali membentuk pandangan bahwa peran perempuan terbatas pada ranah domestik. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan bahwa banyak perempuan di Lombok NTB yang merasa tertekan untuk tidak terlibat dalam politik karena *stigma sosial* yang menganggap perempuan yang aktif dalam politik sebagai "melanggar kodrat". Hal ini menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan.

Adat istiadat masyarakat sering menunjukkan bahwa perempuan terbatas pada pekerjaan domestik. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap konsep kesetaraan gender, khususnya dalam ranah politik. Banyak yang masih meyakini bahwa kodrat perempuan adalah berada di wilayah domestik, bukan publik. Seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh adat Amak Husnan di Lombok Utara mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu ikut urusan politik karena bukan pada porsinya (Wawancara tanggal 4 Oktober 2024). Pandangan ini mencerminkan adanya pengaruh patriarki kultural, sebagaimana dijelaskan oleh Sylvia Walby (1990) dalam (Murray, 1990) bahwa sistem patriarki bekerja melalui budaya dan tradisi yang menormalisasi subordinasi perempuan. Sebaliknya, informan dari para muda, terdidik, dan aktivis menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi terkait pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik. Ungkapan tersebut dipertegas oleh seorang mahasiswa Rian dari Selong Lombok Timur bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama menjadi seorang pemimpin (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024). Pandangan ini sejalan dengan pendekatan konstruksionis sosial dalam sosiologi gender, seperti yang diuraikan oleh (West & Zimmerman,

1987) melalui teori *doing gender*, yang menekankan bahwa peran gender bukanlah bawaan biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang bisa dinegosiasi dan diubah.

Menariknya, sebagian informan menunjukkan keraguan: mereka mengakui pentingnya kesetaraan gender, tetapi masih ragu untuk mendukung perempuan menjadi kepala daerah karena takut menghadapi resistensi sosial atau tidak terbiasa melihat figur perempuan memimpin. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Saleh seorang pedagang di Mataram bahwa masyarakat belum siap mempunyai pemimpin perempuan yang kemungkinan tidak dihargai. Ambivalensi ini mencerminkan yang disebut Pierre Bourdieu (1991) dalam (Ida Bagus Wirawan, 2014) sebagai bentuk dominasi simbolik: meskipun masyarakat tidak secara langsung menolak perempuan, mereka tetap tunduk pada habitus sosial yang telah terbentuk lama, sehingga kesetaraan hanya menjadi wacana, bukan praktik. Beberapa informan juga menyebutkan bahwa kesadaran gender mulai tumbuh melalui peran media, pendidikan, dan organisasi perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran gender dalam masyarakat NTB berkembang secara bertahap dan kontekstual dan perubahan menuju kesetaraan memerlukan waktu, terutama untuk menembus struktur sosial yang telah lama bersifat patriarkal. Kesadaran tentang kesetaraan gender dipengaruhi oleh Pendidikan. Pendidikan yang rendah dapat membatasi pemahaman dan pengetahuan perempuan mengenai hak-hak politik mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, terdapat contoh positif dari perempuan yang berhasil menembus batasan-batasan sosial ini. Misalnya, Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun, yang merupakan perempuan pertama yang terpilih dalam posisi tersebut, telah menunjukkan bahwa perempuan juga mampu memimpin dengan baik. Keberhasilannya dalam memimpin daerah tersebut menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lainnya di NTB untuk berpartisipasi dalam politik. Melalui upaya peningkatan pendidikan dan kampanye kesadaran gender, masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan mereka terhadap calon kepala daerah perempuan. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender dalam politik.

Masyarakat Lombok pada khususnya yang memiliki kesadaran tinggi tentang kesetaraan gender cenderung lebih terbuka terhadap calon kepala daerah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai kesetaraan gender dapat mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap kepemimpinan sebagai tugas laki-laki. Namun, tantangan tetap ada karena sebagian besar masyarakat di daerah ini hidup dengan kultur patriarki yang kuat, dan stigmatisasi perempuan yang masih menjadi masalah.

Gender sebagai konstruksi sosial bahwa selama ini relasi gender seringkali dipengaruhi oleh konstruksi patriarki yang mengutamakan laki-laki dalam posisi kepemimpinan. Karena *stereotip* yang melekat pada perempuan tentang kelembutan, emosionalitas, dan tanggung jawab rumah tangga, mereka sering dianggap tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Pada akhirnya, meskipun ada undang-undang formal yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menjabat sebagai kepala daerah, tetapi, masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip ini. Kesadaran tentang kesetaraan gender dalam masyarakat NTB masih belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sangat sedikit calon kepala daerah perempuan yang berhasil melaju ke babak Pilkada.

Dukungan Partai Politik dan Popularitas Calon

Dukungan partai politik merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada. Dalam konteks NTB, partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon. Menurut data dari KPU NTB, pada Pilkada 2024 terdapat peningkatan jumlah partai yang mengusung calon perempuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap dalam partai politik terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Dukungan partai politik tidak hanya berdampak pada popularitas calon, tetapi juga pada akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam kampanye. Partai politik yang kuat biasanya memiliki jaringan yang luas, yang dapat dimanfaatkan oleh calon perempuan untuk menjangkau pemilih. Sebagai contoh, calon perempuan yang didukung oleh partai besar sering kali mendapatkan akses lebih baik terhadap dana kampanye, tim sukses, dan media. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks Pilkada yang kompetitif, di mana sumber daya yang memadai dapat menjadi faktor penentu.

Dukungan Partai Politik Masih bias Gender, beberapa informan mengungkapkan bahwa partai politik cenderung lebih mudah mengusung calon laki-laki, meskipun ada figur perempuan yang dinilai memiliki kapasitas. Perihal tersebut dipertegas dengan ungkapan seorang aktivis perempuan Bu Hasanah dari Selong mengatakan bahwa partai pengusung biasanya lebih memilih laki-laki yang lebih pintar memobilisasi massa (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024).

Pernyataan ini mengacu pada dominasi struktural dalam partai politik yang dijelaskan oleh Sylvia Walby (1990) sebagai bagian dari sistem patriarki institusional, dimana struktur formal politik menghambat partisipasi perempuan karena didesain berdasarkan nilai-nilai maskulin. Beberapa informan menyebutkan bahwa popularitas calon perempuan seringkali diukur dari aspek-aspek personal seperti penampilan, status perkawinan, dan kehidupan domestiknya, bukan dari rekam jejak politik atau kapasitas kepemimpinannya. Hal ini dituturkan oleh seorang Jurnalis Pak Ahmad dari Mataram mengatakan bahwa seorang dipilih dari baju yang sering digunakan kemudian terkenal serta wajahnya ganteng atau cantik, atau bahkan duda atau janda bukan pada program yang diberikan oleh calon (Wawancara tanggal 1 Oktober 2024)

Fenomena ini menunjukkan praktik *gendered framing*, di mana media dan publik lebih fokus pada karakteristik feminin daripada substansi politik. Ini berkaitan dengan pandangan (Butler, 1990) yang menyatakan bahwa identitas gender dibentuk dan dilekatkan melalui repetisi simbolik — dalam hal ini, perempuan politisi dilihat bukan sebagai aktor politik, tetapi sebagai “perempuan publik” yang harus tetap memenuhi norma-norma feminitas. Beberapa informan juga mengakui bahwa meskipun ada calon perempuan yang populer, mereka masih ragu untuk memilih karena tidak yakin akan mampu memenangkan kontestasi, terutama karena dukungan partai yang lemah dan stigma sosial. Hal ini dipertegas oleh seorang aktivis LSM dari Lombok Tengah Pak Andi mengungkapkan bahwa terkadang walaupun perempuan terkenal dan berkuasa tetapi kalau tidak didukung oleh partai besar susah untuk menang dalam kontestasi pilkada (Wawancara tanggal 2 Oktober 2024)

Ini menggambarkan realitas kapital politik yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Pierre Bourdieu dalam kerangkanya menyatakan bahwa,

perempuan dalam politik lokal cenderung memiliki modal politik dan simbolik yang lebih rendah, karena tidak hanya harus bekerja keras untuk memperoleh legitimasi elektoral, tetapi juga harus menghadapi batasan-batasan sosial berdasarkan gender. Dalam wawancara dengan beberapa tim sukses, ditemukan bahwa proses seleksi dan pencalonan dalam internal partai masih menempatkan perempuan sebagai “alternatif terakhir”, atau hanya sebagai wakil, bukan calon utama.

Hal ini memperkuat temuan bahwa partisipasi perempuan dalam politik formal belum dibangun dalam kerangka kesetaraan substantif, melainkan masih bersifat simbolik atau tokenisme. Peran partai politik juga tidak kalah penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan. Partai politik yang mendukung calon perempuan dengan visi yang jelas dan program-program yang relevan untuk daerah tersebut dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik calon tersebut di mata pemilih. Oleh karena itu, dukungan partai politik yang kuat dan strategi kampanye yang efektif sangat penting dalam meraih suara di Pilkada NTB 2024. Popularitas calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada NTB 2024 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman politik, jaringan sosial, dan kemampuan dalam membangun koalisi dengan berbagai pihak. Calon perempuan yang memiliki latar belakang pengalaman yang kuat dalam pemerintahan atau telah terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, calon yang kurang dikenal atau baru pertama kali terjun dalam dunia politik cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik merupakan faktor penghambat calon untuk memperjuangkan representasi perempuan (Parawansa, 2002).

Dilihat dari hasil wawancara beberapa informan mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin dilihat juga dari calon kepala daerah perempuan yang didukung oleh partai besar seperti PDIP atau Golkar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari media dan masyarakat, dibandingkan dengan calon independen. Contohnya adalah calon kuat wakil Gubernur Indah Damayanthi Putri diusung oleh Partai Golkar, hal ini menunjukkan bahwa dukungan partai politik memiliki dampak signifikan pada popularitas calon perempuan. Namun, meskipun dukungan partai politik penting, faktor lain seperti pengalaman dan latar belakang calon juga berperan. Selain itu, masyarakat cenderung lebih percaya kepada calon yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau organisasi masyarakat.

Contoh kasus yang relevan adalah Hj. Siti Rohmi Djalilah, Wakil Gubernur NTB, yang berhasil meraih dukungan luas berkat pengalamannya di dunia pendidikan dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dapat menjadi aset berharga dalam membangun persepsi positif di mata masyarakat. Dari perspektif sosiologi gender, terdapat anggapan bahwa perempuan seringkali dianggap kurang mampu dalam posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi calon kepala daerah perempuan untuk menunjukkan kompetensi dan visi yang jelas dalam kampanye mereka. Dalam konteks Pilkada NTB 2024, persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah perempuan juga dipengaruhi oleh media. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat membantu mengubah stigma negatif terhadap perempuan dalam politik. Sebuah studi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan bahwa pemberitaan yang positif tentang calon perempuan dapat meningkatkan dukungan masyarakat. Misalnya, jika

media menyoroti prestasi dan program kerja calon perempuan, hal ini dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan peluang mereka untuk terpilih. Lebih lanjut persepsi masyarakat tentang keterlibatan calon pemimpin perempuan dalam politik merupakan cermin bagi kaum perempuan yang memiliki niat untuk terjun kedalam dunia politik. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya keluarga, ketika ada keinginan untuk terjun kedalam politik karena dukungan tersebut menjadi hal yang lebih baik untuk kemajuan dan kehidupan yang lebih baik bagi kaum perempuan (Lubis & Halking, 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sangat beragam seperti terkait norma budaya dan pandangan konservatif mengenai peran perempuan dalam politik, Meskipun terdapat dukungan yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan stereotip gender. Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap calon perempuan, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal edukasi dan kampanye yang menekankan pada kemampuan dan prestasi calon.

Keberhasilan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada NTB 2024 sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, menunjukkan kompetensi, serta memiliki visi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pada akhirnya, Pilkada NTB 2024 bisa menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa membawa perubahan yang positif dan membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam politik bukan hanya sebuah impian, melainkan suatu kenyataan yang bisa tercapai.

Rekomendasi untuk calon kepala daerah perempuan adalah untuk meningkatkan keterlibatan dengan komunitas, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal mereka sebagai individu dan pemimpin. Selain itu, penting untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan pesan yang jelas dan positif tentang visi dan misi mereka. Dengan demikian, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya dalam Pilkada, dapat meningkat dan menghasilkan pemimpin yang lebih beragam dan representatif.

Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Gender*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/16/a37fb493455d772274cc2314/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2022.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pemilih di Nusa Tenggara Barat*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY1IzI=/jumlah-pemilih.html>
- Berger, P. L. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES Jakarta.
- Brickell, C. (2006). The sociological construction of gender and sexuality. *The Sociological Review*, 54(1), 87–113. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2006.00603.x>.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Connell, R. W. (2003). *Men, gender and the state*. Ashgate Publishing.

- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar Offset.
- Fitriani, T. (2023). Partai Politik dan Strategi Politik (Kajian Atas Strategi Kemenangan Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan di Dalam Pemilihan Legislatif Pada Dapil 2, 4, dan 5 Kota Tangerang Tahun 2019). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72975>.
- Hanasi, R. A. (2025). Peran Gender Dalam Proses Pengambilan Keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo: Perspektif Partisipasi Perempuan. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 318-333. <https://doi.org/10.61787/fq55hb91>.
- Hilmiati, H., Dewi, E., & Zuherni, Z. (2022). Persepsi Masyarakat Atas Kepemimpinan Perempuan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 117-135. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>
- Hulaipah, A., Pana, A., Rizaldi, I., Thamrin, I. R., Malik, A., Hadi, S., & Hidayati, V. R. (2024). Ketidaksetaraan Gender terhadap Pendidikan dalam Bingkai Awig-Awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 300-303. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2060>.
- Ida Bagus Wirawan. (2014). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Cetakan ke). Prenada Media Group.
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi peran perempuan desa dalam belenggu budaya patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 95-108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>.
- Kaltsum, A. U., Kambo, G. A., & Muhammad, M. (2022). Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 91-100. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1887>.
- Kambo, G. A. (2017). Penguatan identitas perempuan dalam pemilihan kepala daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(1), 1-16.
- Karauwan, M. M. (2021). Komunikasi Politik Perempuan Kepala Daerah Dalam Mempertahankan Kepemimpinan Kabupaten Lebak. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 87-97. <https://doi.org/10.24853/pk.5.1.87-97>.
- Kiki, S. L., & Ali, F. (2024). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Kada. *PELITA Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(2), 47-59. <https://doi.org/10.33592/pelita.v24i2.5385>.
- Lubis, S., & Halking, H. (2024). Persepsi Masyarakat tentang Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11834-11849. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11972>.

- Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2022). Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 101–116. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.101-118>.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Murray, M. (1990). [Review of *Theorizing Patriarchy*, by S. Walby]. *Work, Employment & Society*, 4(3), 473–475. <http://www.jstor.org/stable/23747673>.
- Natasya, A. A., Melviana, P. P., Wilapa, N. F. R., Rahmawati, S., Jovanka, N., Mauliana, R. P., Maulidah, F., & Celesta, A. A. (2024). Affirmative Action Dalam Politik Lokal: Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Semarang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 139-150. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.341>.
- Oxfam di Indonesia. (2023). *Risalah Proyek I WIL: Nyala Asa Perempuan Berdaya di Nusa Tenggara*. <https://indonesia.oxfam.org/risalah-proyek-i-wil-nyala-asa-perempuan-berdaya-di-nusa-tenggara>. Diakses tanggal 25 Mei 2025.
- Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. In *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah* (pp. 41–52).
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University.
- Rahmawati, A. D., & Ummah, K. C. (2023). Representasi Kepemimpinan Klebun Perempuan di Madura: Upaya Menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 174–183. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.411>.
- Rahmayanty, D., Wulandari, N., Pratama, M. R., & Putri, N. (2023). Ketidaksetaraan gender dalam sistem patrilineal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6513–6522. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5623>.
- Sangari, C. L., Pati, A., & Kimbal, A. (2017). Peran Politik Perempuan dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16585>.
- Sari, M. (2022). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Periode 2019-2024 Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Minimnya Kemenangan Perempuan di Kursi DPRK). *Skripsi*. UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22307>.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>.
- Women, U. N. (2020). *Gender equality: Women's rights in review 25 years after Beijing*. UN Women.